

December 2013

## Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia

Sarie Febriane

*Alumni Program Pasca Sarjana Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional, Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI, verian@gmail.com*

Mariamah M

*Alumni Program Pasca Sarjana Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional, Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI, riayaa@gmail.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

---

### Recommended Citation

Febriane, Sarie and M, Mariamah (2013) "Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 15 : No. 2 , Article 3.

DOI: 10.7454/global.v15i2.34

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol15/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## KEBERHASILAN SEMU DERADIKALISASI DI INDONESIA

**Sarie Febriane**

**Alumni Program Pasca Sarjana Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional,  
Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI**

**Email: verian@gmail.com**

**Mariamah**

**Alumni Program Pasca Sarjana Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional,  
Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI**

**Email: riayaa@gmail.com**

### ***Abstrak***

*This paper researches the claim made by the Indonesian government regarding the deradicalization program that it ran to deradicalize militants. The Indonesian government claimed that the deradicalization program had been very successful and effective in countering religious extremism. This paper will examine the effects of the de-radicalisation program and will argue that the program has not been as effective as has been claimed. This paper highlights researches which indicate that the program doesn't have a clear structure and the facts that it has been used by terrorist suspects to leave prison through using rewards received after joining the program and rather than being 'de-radicalised' have returned to their terrorist networks and involvement in serious terrorist activities and planning. Whilst the effectiveness of deradicalization program had been claimed by the Indonesian government, this paper argues that the current weak structure of the Indonesian prison system has contributed to the ineffectiveness of the disengagement and deradicalization process. This paper also looks at how the deradicalization program had been used primarily as the purpose of data gathering. Finally this paper will end by proposing recommendation for improving and strengthening the prison system in Indonesia to strengthen disengagement process.*

### ***Kata kunci:***

*Terrorist, deradicalization, disengagement, weak state, religious extremism, prison system*

*Everybody's worried about stopping terrorism.*

*Well, there's a really easy way: stop participating in it*

*(Noam Chomsky)*

Sebelum mengulas program deradikalisasi di Indonesia, tulisan ini terlebih dahulu memberikan gambaran singkat dan latar belakang mengenai radikalisme. Radikalisme kerap diidentikkan dengan keagamaan. Radikalisme keagamaan diartikan sebagai gerakan keagamaan yang berusaha untuk merombak secara total suatu tatanan politis dan/atau tatanan sosial yang berlaku dengan menggunakan kekerasan.<sup>i</sup> Kendati demikian, terminologi radikalisme sendiri pada dasarnya terkait dengan pertentangan yang tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh suatu kelompok (agama) dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan di suatu masa. Pertentangan tajam itulah yang lantas dikonotasikan dengan kekerasan secara fisik karena sebuah perubahan berpotensi menyebabkan benturan-benturan.<sup>ii</sup> Tulisan ini berpandangan bahwa terminologi radikal, yang berasal dari kata latin *radix*, sebenarnya secara prinsipil tidak berasosiasi pada kekerasan. Pemikiran radikal tidak identik dengan penggunaan instrumen kekerasan.

Ada dua istilah dalam diskursus radikalisisasi yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu deradikalisasi dan *disengagement*, atau pemutusan keterikatan, yang seringkali kabur dan digunakan secara bergantian. Tulisan ini mengacu pada pendapat John Horgan mengenai kedua istilah tersebut. Menurut Horgan, deradikalisasi adalah melunaknya pandangan, yaitu: penerimaan pandangan bahwa cara seorang individu dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan terorisme merupakan sesuatu yang tidak sah, tidak bermoral, dan tidak bisa dibenarkan.<sup>iii</sup> Sementara itu, *disengagement* mengacu pada adanya perubahan sosial dan kognitif kritis yang ditandai dengan langkah untuk meninggalkan norma-norma, nilai, perilaku, dan aspirasi sosial yang ditempa secara seksama ketika individu tersebut masih menjadi anggota jaringan teroris. Meskipun *disengagement* mengindikasikan kepatuhan seorang individu terhadap nilai dan perilaku yang telah dijelaskan sebelumnya, individu tersebut masih terlibat dalam perilaku sosial lain yang mendukung terorism namun tidak lagi terlibat dalam operasi terorisme yang sebenarnya. Menurut Horgan, proses *disengagement* terdiri dari dua bagian yang terpisah, yaitu fisik dan psikologis.<sup>iv</sup>

Tulisan ini menguraikan mengapa kesuksesan program deradikalisasi di Indonesia merupakan kesuksesan yang semu, cenderung tidak realistis, dan tumpang tindih dengan proses penanganan (penanggulangan) terorisme yang lain, yaitu: kegiatan pengumpulan data yang merupakan bagian dari kegiatan intelijen. Pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini adalah: apakah program deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dan klaim

atas kesuksesannya cukup realistis sehingga dapat dijadikan patokan untuk mengukur kesuksesan dalam mencegah aktivitas yang terkait terorisme di Indonesia?

### **Sejarah Singkat Radikalisasi di Indonesia**

Cita-cita negara Islam di bumi Nusantara bukanlah sebuah mimpi baru. Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, cita-cita tersebut telah hidup dalam benak sebagian tokoh bangsa. Paham *salafy* pun telah masuk ke Indonesia sekitar tahun 1800an di Minangkabau, Sumatera Barat, yang mengerucut dalam konflik antara kaum Padri dengan kaum Adat. Konflik tersebut merupakan konflik berdarah yang bermula dari cita-cita untuk “memurnikan” ajaran Islam. Kekecewaan kalangan penyokong hukum Islam juga sudah terjadi sejak perubahan isi Piagam Jakarta. Cita-cita negara Islam akhirnya mengkristal ketika Darul Islam (DI) mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII) tahun 1949.<sup>v</sup>

Secara singkat, merujuk pada penelaahan Solahudin, ajaran *salafy* yang dianut para kader DI secara signifikan bertransformasi menjadi *salafy* jihadisme sejak pengiriman 200 kader DI ke Afghanistan pada kurun waktu 1985-1991. Pengiriman yang dimotori Abdullah Sungkar (yang kemudian mendirikan Jemaah Islamiyah di tahun 1993) itu dilakukan dalam rangka mengikuti program pelatihan militer di kamp bentukan Abdullah Azzam, tokoh jihad asal Palestina yang berpengaruh dan juga merupakan mentor Usamah Bin Ladin. Niat dari keikutsertaan dalam pelatihan tersebut ketika itu didorong oleh kepentingan politik lokal yakni untuk memerangi dan menggulingkan pemerintahan Orde Baru dan kemudian mendirikan (kembali) negara Islam (*daulahislamiyah*) di bumi Nusantara.

Seperti diuraikan oleh Solahudin, pengertian jihad versi DI merujuk pada buku *Sikap Hijrah* karya Kartosuwirjo, imam DI yang pertama. Jihad, oleh Kartosuwiryo, bukan diartikan sebagai perang. Dia meyakini perang hanyalah *jihadul asghor* (jihad kecil) sementara *jihadul akbar* (jihad besar) adalah melawan hawa nafsu. Pemahaman akan jihad ini kemudian dikoreksi oleh para penganut *salafy* jihadisme di Afghanistan. Menurut mereka jihad adalah *qital* (perang). Mereka juga mengoreksi pemahaman mengenai NII. Setelah kekalahan DI di tahun 1962, DI tidak menguasai satu wilayah pun di Indonesia sehingga para ulama menganggap NII tak lagi aktif. Para kader DI tidak berpendapat demikian. Dalam pandangan *salafy* jihadisme, sebuah negara disebut *Daulah Islamiyah* jika dipimpin oleh seorang muslim, menguasai wilayah tertentu, dan diterapkan syari’at Islam. Oleh karena itu,

pandangan *salafy* jihadisme menganggap DI pasca 1962 bukan negara melainkan *jamiatul minal muslimin* atau jamaah yang memperjuangkan negara Islam.

Terkait *salafy* jihadisme atau *jihad as salafyyah* tersebut, Solahudin memaparkan bahwa *salafy* jihadisme terlahir dari rahim ajaran-ajaran *salafy* atau *neo-wahhabi*.<sup>vi</sup> Secara prinsip, *salafy* dan *salafy* jihadisme sama-sama berusaha mengembalikan pemahaman Islam menurut generasi *salafus shalih* (para pendahulu yang shaleh, yakni tiga generasi pertama para pengikut Nabi Muhammad) yaitu Islam yang menurut mereka masih murni dan belum terdistorsi dan mengajukan penafsiran yang literal terhadap Al Quran dan Sunnah (tingkah laku atau praktik normatif kehidupan Nabi Muhammad). Kedua ajaran ini, *salafy* dan *salafy* jihadisme, sama-sama ingin memurnikan Islam dari apa yang dilihatnya sebagai inovasi (*bid'ah*), peniruan buta (*taklid*), dan penyembahan berhala (*syirik*).<sup>vii</sup> Solahudin menjelaskan bahwa secara tauhid dan fikih ibadah pemahaman kedua ajaran ini serupa. Keduanya juga sama-sama merujuk pada fatwa-fatwa dari para ulama salaf seperti Ibn Taymiyyah (1263-1328), Ibn Qoyim, serta Ibn Katsir. Namun, kaum *salafy* jihadis memiliki doktrin jihad dan doktrin *tauhid hakimiyah* (kedaulatan politik sepenuhnya milik Allah) yang berbeda dengan ajaran kaum *salafy*.

Dalam doktrin *salafy* jihadisme, *irhabiyah* (terorisme) juga dibenarkan. Salah satu bentuk teror yang diizinkan adalah membunuh warga sipil yang selama ini dilarang untuk dibunuh seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua serta pendeta. Orang-orang tersebut dianggap halal darahnya bila mereka ikut membantu memerangi orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Membunuh mereka juga dibenarkan dalam rangka *qishas* atau balas dendam. Pengkafiran pada muslim lain tersebut merupakan implikasi dari tulisan-tulisan Sayyid Quthb (1906-1966) seperti *takfir*, bahwa muslim nominal (atau sering juga disebut *Islam KTP*) telah menjadi kafir dan boleh dibunuh. Sayyid Quthb adalah aktivis Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dieksekusi mati tahun 1966. Saat di penjara di bawah rejim pemerintahan Gamal Abdel Naseer, Quthb sempat menulis “manifesto” politik Islamisme radikal yang kemudian sangat berpengaruh di kalangan kelompok radikal Islam yaitu *Ma'alim fi Al-Thariq*.<sup>viii</sup>

### **Radikalisasi di Indonesia Saat Ini**

Survei dari Lembaga Lazuardi Birru dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LKIP) dapat menjadi salah satu cerminan realita di lapangan mengenai radikalisme di Indonesia saat ini. Survei Lazuardi Birru mengungkapkan, indeks radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 masih berada dalam batas aman, yakni 43,6. Nilai ambang aman itu sendiri yakni 33,3.<sup>ix</sup> Meskipun fenomena radikalisme di Indonesia dapat dikatakan pada kondisi aman beberapa daerah tetap dinilai rawan dalam survei tersebut antara lain Aceh, Jawa Barat, dan Banten.

Sementara itu, survei LKIP tahun 2011 terhadap 993 pelajar dari 100 sekolah menengah (SMP dan SMA) di Jakarta menyebutkan, 49% siswa setuju dan bersedia ikut aksi kekerasan untuk menyelesaikan masalah berlatar belakang agama dan moral. Sebanyak 14,2% pelajar (SMP dan SMA) yang disurvei tersebut juga menyebutkan bahwa aksi pengeboman yang dilakukan Imam Samudra, Amrozi, dan Noordin M Top dapat dibenarkan. Kemudian, 84,8% pelajar juga setuju pemberlakuan syariat Islam dan 25,8% menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai sebagai dasar negara. Yang juga menarik, survei ini juga dilakukan terhadap 590 guru agama Islam dari 100 sekolah tersebut. Hasilnya, 28,2% menyetujui aksi radikal, 7,5% membenarkan pengeboman, dan 76,2% setuju pemberlakuan syariat Islam, dan 21,1% menganggap Pancasila tidak lagi relevan.<sup>x</sup>

Sebagai tambahan, Majalah *Time* dalam laporan khususnya edisi Februari 2007 mengungkapkan bahwa 53 kabupaten (lebih dari 10% dari total jumlah kabupaten di Indonesia) memberlakukan peraturan daerah yang merujuk pada atau terinspirasi oleh hukum syariah. Sementara itu, di tahun 2003 kondisi yang sama hanya terjadi di tujuh kabupaten saja.

### **Klaim Program Deradikalisasi di Indonesia**

Indonesia kerap kali disebut sebagai salah satu contoh negara yang berupaya mewujudkan langkah deradikalisasi terhadap narapidana ataupun mantan narapidana terorisme. Deradikalisasi diklaim oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara penanggulangan terorisme yang efektif. Diskursus deradikalisasi mengemuka seiring dengan serangkaian keberhasilan penangkapan ratusan orang yang terlibat dalam jejaring kelompok teror di Indonesia. Berbagai komentar di arena internasional menganggap kontraterorisme di Indonesia berhasil dengan merujuk pada banyaknya jumlah orang yang ditangkap terkait

terorisme. Berdasarkan potret itu pula, majalah *Time* pun menilai bahwa kontraterorisme di Indonesia adalah potret keberhasilan yang patut dijadikan contoh di arena internasional.<sup>xi</sup> Tim kepolisian dalam Detasemen 88 Antiteror dinilai sebagai sebuah tim antiteror yang kuat dan baik. Zachary Abuza, pengamat terorisme dari Simmon College, Boston, bahkan menyebut tak ada negara lain yang cukup layak untuk dianggap sukses selain Indonesia dalam hal kemajuan dalam kapabilitas operasi kontraterorisme.<sup>xii</sup>

Kesuksesan pemberangusan jejaring terorisme ini ditengarai tak terlepas dari pengejawantahan “program” yang diklaim sebagai upaya deradikalisasi yang sepenuhnya dijalankan oleh kepolisian diantaranya melalui konseling spiritual, dan memperlakukan tahanan teroris dengan baik. Sarlito Wirawan, psikolog yang kerap bekerja sama dengan kepolisian, mengatakan kepada *Time* bahwa tanpa harus memiliki penjara Guantanamo, Indonesia sukses membongkar jejaring teror karena mampu memahami kondisi psikis para teroris. Oleh karena itu, sebagian tahanan teroris pada akhirnya bersedia bekerjasama untuk mengungkapkan jaringan mereka. Hal inilah yang disebut Sarlito sebagai kunci kesuksesan dalam membongkar jejaring kelompok terorisme di Indonesia. *Time* juga menyebut bahwa kepolisian Indonesia cenderung menganggap para teroris bukan sekadar pelaku kriminal kejahatan luar biasa namun juga sebagai orang-orang yang secara ideologi tersesat jiwanya.

Klaim pengejawantahan program deradikalisasi ini dapat dicermati dari buku *Deradikalisasi Terorisme* yang ditulis oleh Petrus Reinhard Golose, seorang polisi (pernah menjadi Direktur Penindakan di BNPT) yang kerap terlibat langsung dalam berbagai operasi terorisme di Indonesia. Golose menyebutkan bahwa aparat kepolisian Indonesia merupakan pelaku program deradikalisasi. Merekalah yang menjalankan program deradikalisasi terhadap para tahanan yang terlibat pidana terorisme. Program ini disebut sebagai bentuk *soft approach* kepolisian dalam menangani kasus terorisme. Pendekatan ini sebenarnya sudah digunakan kepolisian sejak kasus Bom Bali I tahun 2002 dalam hal teknik interogasi.<sup>xiii</sup>

Program deradikalisasi di Indonesia dibahas pula dalam sebuah disertasi yang berjudul *Penanganan Polri terhadap Organ Teror dalam Al Jamaah Al Islamiyah* oleh Benny Jozua Mamoto dari Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia tahun 2008. Benny merupakan perwira polisi yang terlibat dalam operasi terorisme sejak peristiwa Bom Bali I tahun 2002. Benny diantaranya sempat bertugas menginterogasi Amrozi, terpidana mati kasus tersebut yang telah dieksekusi.<sup>xiv</sup> Benny dalam disertasinya

mengungkapkan bahwa dari seluruh tersangka yang telah ditangkap Polri hingga 2007, yakni 408 orang, baru 53% yang sudah dan dalam proses pembinaan deradikalisasi.

### **Telaah Kritis terhadap Pelaksanaan Program Deradikalisasi di Indonesia**

Telaah kritis terhadap program deradikalisasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia dapat ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh RAND. RAND menyebut bahwa Indonesia pada dasarnya (hingga 2010) tidak memiliki program deradikalisasi dalam artian tersentral, terstruktur, terkoordinasi dengan berbagai perangkat negara, serta memiliki kapasitas yang baik, seperti halnya yang terjadi di Malaysia dan Singapura. Apa yang disebut sebagai program deradikalisasi nyatanya hanya bersifat *ad-hoc*, hanya dilakukan pihak kepolisian, dan bukan merupakan program yang dilakukan secara lintas sektoral. Bahkan, pendanaannya pun diakui petinggi kepolisian dalam tim polisi antiteror merupakan dana yang diperoleh dari sumber swasta atau donatur yang notabene relasi polisi dari kalangan pengusaha. Apa yang disebut “program deradikalisasi” di Indonesia hanya sebatas pendekatan budaya dalam hal interaksi antara polisi dengan tahanan teroris. Hal ini juga nampak jelas dari disertasi Benny Jozua Mamoto yang menyebutkan program ini sebagai teknik interogasi tahanan teroris yang mengadopsi cara non-kekerasan. Dengan cara itu pula Benny sendiri, misalnya, berhasil membuka mulut Amrozi yang belasan jam sebelumnya menolak berbicara pasca-penangkapan terkait Bom Bali I.

Para tahanan teroris diperlakukan dengan baik, seperti diajak makan bersama, dipertemukan dengan keluarga, diberi sel yang nyaman, bahkan sholat bersama-sama. Mereka juga difasilitasi dan dibiayai berbagai kebutuhan keluarganya termasuk ongkos saat mereka menikah.<sup>xv</sup> Salah satu anggota JI, Abu Dujana, misalnya, saat ditahan selama proses penyidikan ditempatkan oleh polisi di tahanan khusus bagi perwira tinggi polisi yang terjerat hukum di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua. Sel yang ditempati Dujana berukuran luas, sekitar 5x4 meter persegi, dengan kasur pegas, perabot lainnya, kamar mandi pribadi, dan berpendingin udara.<sup>xvi</sup> Bahkan, sempat pula salah seorang petinggi polisi mengajak Ali Imron, terpidana seumur hidup Bom Bali I, jalan-jalan dan minum kopi bersama di Kedai Kopi Starbucks di Plaza E(x).<sup>xvii</sup> Peristiwa itu sempat melecut kemarahan pihak Australia, yang banyak dari warganya menjadi korban Bom Bali I. Sikap akrab dan ramah dari aparat terhadap para teroris ini dianggap pihak Australia mengusik rasa keadilan di pihak korban.

Sementara, pihak kepolisian meyakini cara tersebut jitu dalam menyelami informasi dalam jejaring kelompok teror.

Pendekatan budaya yang dikemas dalam program deradikalisasi ini, yang diterapkan dalam interogasi maupun interaksi dengan tahanan teroris, tidak lain bertujuan pragmatis atau sebagai bagian dari strategi intelijen untuk mengetahui lebih jauh mengenai jejaring kelompok teror. Pola pendekatan demikian cukup jamak dilakukan aparat intelijen di masa lalu dalam menghadapi kelompok radikal seperti misalnya DI atau NII. Aparat merangkul beberapa figur kelompok radikal dalam rangka memperoleh informasi, memecah belah, dan menyusupi figur pembocor informasi tadi kembali ke kelompoknya untuk menjadi mata-mata. Contohnya adalah terbentuknya faksi NII KW 9. Laporan ICG pada Februari 2005 menunjukkan di masa lalu aparat intelijen juga kerap memanfaatkan kelompok Islam radikal seperti DI untuk mengumpulkan suara bagi Golkar dengan jargon menghadang ancaman kekuatan komunis. Pasca-peristiwa Gestapu tahun 1965, pemerintahan Soeharto juga memanfaatkan anggota DI dan membekali mereka dengan senjata untuk melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dimusuhi pula oleh DI. Prinsip yang berlaku bagi negara ketika itu adalah musuh dari musuh negara adalah kawan.<sup>xviii</sup>

Selain itu, pendekatan lunak dalam penyidikan di Indonesia dilakukan untuk membuat teroris bersedia buka mulut dengan diberi janji imbalan berupa keringanan jeratan hukuman ataupun amnesti masa hukuman penjara.<sup>xix</sup> Dengan demikian, berdasarkan contoh-contoh di atas, apa yang diklaim sebagai program deradikalisasi sebenarnya cenderung bersifat transaksional. Tujuannya adalah untuk membongkar jejaring dan untuk itu pendekatan lunak yang disebut sebagai bagian dari “program deradikalisasi” tersebut dijalankan.

Di samping itu, pihak kepolisian juga memfasilitasi forum dialog religius antara tokoh-tokoh agama berpaham moderat dengan para tahanan dan napi teroris. Cara ini, yang juga dilakukan Malaysia, dan Singapura, menurut laporan RAND mengadopsi model deradikalisasi yang diterapkan di Yaman melalui *Committee for Dialogue for Inspiration* yang mengedepankan dialog dan perdebatan intelektual dengan para ekstrimis. Tujuan modeul ini adalah agar para peserta turut mempromosikan paham Islam yang mendeligitimasi kekerasan. Pendekatan dialog tersebut melibatkan mantan petinggi JI yang dianggap telah terderadikalisasi seperti Nasir Abas dengan argumen bahwa pelibatan mantan

petinggi di organisasi JI dilakukan dengan mempertimbangkan kultur JI yang senantiasa hormat kepada senior. Hanya saja, Horgan mengkritisi peserta dialog dalam rangka deradikalisasi ini, yang diklaim sebanyak 10-20 orang, karena sebagian besar hanya anggota “figuran” dalam jejaring kelompok teror dan bukan anggota dari level ideolog atau pendoktrin yang amat keras memegang ideologinya. Figuran yang dimaksud tadi, misalnya, anggota jejaring yang level keterlibatannya hanya sebagai penyokong logistik, simpatisan, ataupun anggota junior.<sup>xx</sup>

### **Efektivitas Pelaksanaan Deradikalisasi di Indonesia**

Dalam analisis RAND, program deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia, yang menasar pada perolehan informasi mengenai jejaring teror, dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana kesediaan para mantan pelaku dan anggota jejaring untuk bekerja sama dengan aparat. Namun, apakah di level kognitif mereka mengalami pergantian ideologi tidaklah dapat dijelaskan. Efektivitas proses kerjasama seperti ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Horgan bahwa setelah melewati tahap meninggalkan gerakan radikal, para mantan pelaku teroris pada dasarnya bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka apabila pihak yang bersangkutan menanyakan pertanyaan yang tepat.<sup>xxi</sup> Diluar asumsi ini, tulisan ini berpendapat bahwa sejatinya deradikalisasi tidak sepatutnya hanya digunakan sebagai cara utama untuk mendapatkan informasi karena apabila deradikalisasi diletakkan pada posisi tersebut maka proses ini tidak lain merupakan bagian kecil dari kinerja intelijen, yaitu: pengumpulan data, sehingga semakin menjauhkan tujuan awal proses deradikalisasi, yaitu: melunakkan pandangan-pandangan radikal para pelaku tindakan teror. Hal ini juga berpotensi menjadi *backlash* atau serangan balasan apabila para pelaku tersebut mendapatkan kesan bahwa mereka dimanfaatkan sehingga resikonya adalah rasa kecewa yang dapat semakin memperkuat pandangan radikal dari para pelaku tindakan teror tersebut atau pemanfaatan *reward* yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada para narapidana berupa hukuman yang lebih singkat justru dimanfaatkan untuk segera kembali kedalam jaringan terorisme (lihat contoh kasus Sunata dibawah).

RAND maupun Horgan juga menyebutkan bahwa dari program deradikalisasi di Indonesia yang didengungkan selama ini hanya ada dua contoh yang terbilang sukses, yaitu:

Nasir Abas dan Ali Imron alias Ale, terpidana seumur hidup dalam kasus Bom Bali I. Keduanya banyak membantu polisi dalam memberikan informasi terkait jejaring teror.

Nasir Abas merupakan warga negara Malaysia yang hingga kini memutuskan tetap tinggal di Indonesia dan, berdasarkan pengakuan kepada penulis, dia juga menjalankan bisnis kuliner (kebab) untuk menafkahi diri dan keluarganya. Nasir Abas, mantan ketua *mantiqi* 3 dalam struktur JI lama, dinilai terderadikalisasi mengingat selain bersedia memberikan suplai informasi kepada polisi Indonesia juga aktif menulis buku yang berupaya mendelegitimasi berbagai serangan teror. Nasir pun secara terbuka mempromosikan deradikalisasi kepada para milisi lainnya. Dalam berbagai kesempatan terbuka, Nasir juga turut serta dalam dialog terbuka soal deradikalisasi di media massa maupun non-media. Salah satu bukunya yang fenomenal adalah *Membongkar Jemaah Islamiyah*.

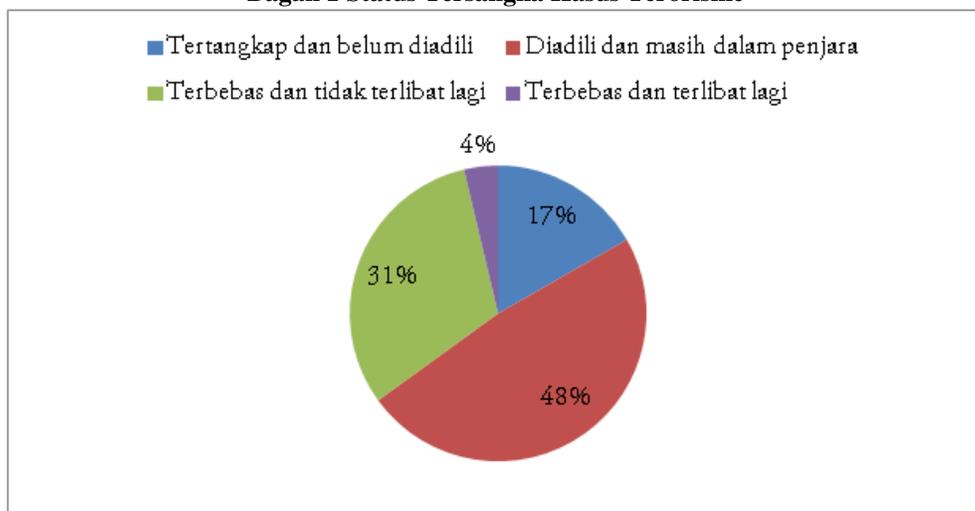
Sementara itu, Ali Imron berperan banyak membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku-pelaku teror ataupun para aktivis dalam jejaring teror, termasuk menginformasikan pola dan ciri peralatan maupun pola rakitan bom yang khas dalam jejaring JI. Salah satu yang krusial adalah penangkapan Dulmatin di Pamulang, Tangerang Selatan, pada Maret 2010 yang dilakukan berkat konfirmasi informasi dari Ali Imron. Polisi yang sebelumnya tak mengenali secara pasti wajah target yang diintai selama berbulan-bulan sebelumnya akhirnya menyodorkan potret wajah target kepada Ali Imron yang lalu memastikan bahwa target tersebut adalah Dulmatin.<sup>xxii</sup>

Selain dua figur mantan teroris yang disebutkan di atas itu, belum ada sosok lain yang dapat dikatakan signifikan terderadikalisasi. Kendati begitu, riset RAND yang menyatakan sulitnya mengukur keberhasilan program deradikalisasi perlu juga untuk disimak. Hal ini bertolak dari sulitnya mengukur apakah seseorang benar-benar sudah terderadikalisasi. Jalan satu-satunya untuk mengukurnya adalah mencermati tindakan dan perkataannya kendati perilaku dan perkataan tidak semata-mata mencerminkan pula tujuan atau cita-cita seseorang (dalam hal ini mantan pelaku teror).<sup>xxiii</sup> Dalam penelitian Horgan, dari sejumlah individu yang sempat terlibat terorisme (bukan kasus di Indonesia) yang pernah diwawancarainya selama kurun waktu 2006–2008 dan diidentifikasi telah terputus keterikatan (*disengaged*), tidak satupun yang dapat dikatakan terderadikalisasi.<sup>xxiv</sup> Oleh karena itu, Horgan berpendapat bahwa rehabilitasi individu pelaku teror secara rasional dan terukur sebaiknya menasar pada terjadinya *disengagement*. Bahkan, Horgan mengungkapkan,

dalam salah satu wawancaranya dengan ulama Sunni radikal, istilah deradikalisasi sebenarnya terkesan ofensif dan salah arah karena tak ada yang salah dengan radikalisasi atau menjadi radikal (mengakar, dari kata latin *radix* atau akar) dalam memahami sesuatu.

Kini, terlepas dari segala pujian di dunia internasional serta klaim-klaim dari pihak negara, serangkaian peristiwa di lapangan sejak tahun 2009 menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai, sejauh ini jumlah orang yang telah ditangkap terkait pidana terorisme mencapai sekitar 600 orang, 500 diantaranya telah diadili dan 210 orang telah bebas dari penjara.<sup>xxv</sup> Dari 210 orang yang telah bebas dari masa hukuman, sebanyak 22 orang (sekitar 10% dari narapidana yang telah bebas) terdeteksi kembali terlibat dalam pidana terorisme. Persentase terpidana kasus terorisme yang sudah ditangkap oleh kepolisian, berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:

**Bagan 1 Status Tersangka Kasus Terorisme**



Dikarenakan tidak ada parameter yang jelas terhadap derajat keradikalan para pelaku tindakan teror, dari persentase di atas tidak bisa disimpulkan sejauh mana program deradikalisasi layak disebut berhasil. Sebab, meskipun yang kembali terjangkit hanya 22 orang (4% dari yang ditangkap), ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi terbebas/keluarnya seorang narapidana dari penjara, seperti tidak cukupnya bukti, motif untuk menunjukkan sikap baik, serta keinginan agar segera keluar dan kembali ke dalam jaringan teror lamanya. Selain itu, faktor kembalinya seorang anggota jejaring teror bisa dipengaruhi oleh seberapa dalam simpati anggota tersebut terhadap visi organisasi, apakah

sekedar simpatisan, atau aktor figuran yang keberadaannya tidak begitu berpengaruh, disamping dipengaruhi oleh faktor seberapa radikal pandangan anggota tersebut.

Tulisan ini juga berpendapat bahwa posisi yang diduduki dalam organisasi atau jejaring teror juga berpengaruh pada terlibat atau tidaknya anggota tersebut setelah keluar dari penjara. Oleh karenanya, selain unit analisa yang digunakan berada di ranah berbeda, deradikalisasi dan *disengagement*, dari diagram pencapaian pihak kepolisian di atas tidak bisa membuktikan efektivitas kinerja deradikalisasi. Persentase keterlibatan kembali mantan napi terorisme yang tertera di atas (belum dihitung termasuk yang masih berstatus napi) memang terkesan kecil, namun secara kualitas peran keterlibatan mereka dalam aktivitas terorisme cukup signifikan. Signifikansi kualitas keterlibatan inilah yang tidak bisa dianggap enteng, terlebih menyangkut soal terancamnya nyawa orang banyak. Kualitas keterlibatan para mantan napi terorisme tersebut dapat ditelaah dari penjabaran kasus-kasus yang dibahas di bawah ini.

Dalam pelaksanaan deradikalisasi, bisa saja secara perilaku dan perkataan seorang napi atau mantan napi terorisme berperilaku baik namun tetap berideologi kuat dan bercita-cita menegakkan negara Islam. Kasus Abdullah Sunata merupakan contoh nyata. Sunata yang sebelumnya aktif membantu kepolisian dalam mengungkap jejaring teror selama masa di penjara, kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat karena dianggap berkelakuan baik selama di penjara, akhirnya tetap kembali lagi ke jejaring terorisme dan terlibat dalam kasus kamp militer di Aceh. Dalam kasus Sunata ini terbukti bahwa *reward* atau timbal balik berupa keringanan hukuman yang kerap diterapkan aparat sebagai imbalan dari kesediaan tahanan teroris untuk bekerjasama dengan polisi tidak selamanya jitu mencegah tahanan teroris untuk tidak kembali ke habitat lama. Langkah tersebut tidak pula jitu untuk dipakai sebagai cara atau trik untuk menderadikalisasi tahanan teroris. Pemberian pembebasan bersyarat kepada Sunata dengan alasan berkelakuan baik selama di penjara juga mencerminkan sistem birokrasi yang memandang persoalan terorisme seperti persoalan kriminal biasa.

Terbongkarnya jaringan kelompok pengebom hotel JW Marriott dan The Ritz-Carlton, kelompok Jatiasih Bekasi, atas rencana penyerangan iring-iringan presiden serta kamp pelatihan militer di Aceh mulai menerbitkan pertanyaan soal diskursus deradikalisasi di Indonesia. Sebab, dari sederet orang yang ditangkap diketahui merupakan mantan

narapidana terorisme serta mantan tahanan polisi terkait kasus terorisme (namun dibebaskan tidak cukup bukti material sehingga tidak dibawa ke pengadilan). Bahkan, sebagian ada yang pernah mengikuti program deradikalisasi.<sup>xxvi</sup> Beberapa nama yang muncul di balik pengeboman JW Marriott dan The Ritz-Carlton, misalnya, merupakan nama-nama lama. Sebut saja, misalnya, Air Setyawan, yang tewas dalam pengepungan di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Air pernah ditangkap pada tahun 2004 terkait pengeboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Namun, karena bukti-bukti material ketika itu tidak mencukupi, Air dibebaskan.<sup>xxvii</sup> Berdasarkan keterangan Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) Noor Huda Ismail, dirinya sempat beberapa kali bertemu Air yang tidak menunjukkan tanda-tanda perilaku radikal yang menjurus pada kemungkinan aksi kekerasan. Bahkan, menurut Huda, sebelum pengeboman Marriott-Ritz, Air dan Huda sempat makan siang bersama di sekitar LP Cipinang usai menjenguk beberapa narapidana terorisme. YPP yang dipimpin Huda selama ini terlibat dalam upaya mendampingi mantan napi terorisme untuk kembali hidup normal di masyarakat tanpa keterlibatan kembali ke jejaring terorisme.<sup>xxviii</sup> Dari pengepungan di Jatiasih itu terungkap bahwa Air, selain terlibat dalam plot rencana pengeboman di hotel Marriott-Ritz, juga terlibat dalam plot rencana penyerangan terhadap iring-iringan kendaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Cikeas.

Nama lain yang cukup dikenal dalam jejaring terorisme adalah Urwah, alias Bagus Budi Pranoto, yang terungkap turut terlibat dalam pengeboman Marriott-Ritz. Urwah pernah ditangkap polisi pada bulan Juli 2004 karena terlibat dalam penyembunyian Noordin M. Top yang, ketika itu, merupakan buronan teroris paling dicari. Urwah pernah mengikuti program deradikalisasi yang diinisiasi oleh kepolisian. Setelah diadili, Urwah bebas dari penjara tahun 2005. Urwah akhirnya tertangkap dalam keadaan tewas saat polisi menggerebek persembuyian Noordin M. Top di Kepuhsari, Solo pada 17 September 2009. Urwah dan Noordin tewas dalam pengepungan polisi di rumah tersebut. Selain itu, ada pula Rohmad Puji Prabowo alias Bejo, yang ditangkap hidup oleh polisi pada September 2009, sebelum penggerebekan di Kepuhsari. Rohmad merupakan mantan terpidana kasus terorisme yang ditangkap pada Juni 2004 terkait kasus bom di Kedutaan Besar Australia di Jakarta.<sup>xxix</sup>

Dari peristiwa terbongkarnya kamp militer di Aceh pada Februari 2010, terungkap pula peran para anggota lama dalam jejaring teror. Mereka dikategorikan dalam tiga jenis pelaku, yaitu: narapidana, bekas narapidana, dan buronan lama kasus terorisme. Mereka

berperan mengarahkan, membuat simpul, merekrut pemain baru, dan memanfaatkan berbagai potensi di Aceh.<sup>xxx</sup> Dari kasus kamp militer di Aceh ini terungkap sejumlah mantan napi, diantaranya: Enceng Kurnia alias Arham, Deni Suramto alias Ziad alias Toriq, Lutfi Haedaroh alias Ubeid, Abdullah Sunata, dan Abu Tholut. Deni dan Ubeid pernah ditangkap pada bulan Juli 2004 karena menyembunyikan Noordin M. Top dan Azahari Husin. Abdullah Sunata alias Arman Kristianto pernah ditangkap 2 Juli 2005 karena menyembunyikan informasi keberadaan Noordin. Sunata lalu mendapat pembebasan bersyarat dari penjara pada Maret 2009 kendati divonis 7 tahun penjara pada 1 Mei 2006.<sup>xxxi</sup> Demikian pula dengan Abu Tholut alias Mustafa yang merupakan mantan narapidana kasus terorisme yang pernah ditangkap tahun 2003 di Semarang karena membangun semacam laboratorium bom dan kepemilikan senjata ilegal jenis M16. Abu Tholut lalu diadili dan divonis 7 tahun penjara, namun hanya menjalani masa 3 tahun penjara.<sup>xxxii</sup> Abu Tholut merupakan mantan Ketua *Mantiqi* III Jemaah Islamiyah tahun 2000-2002 sebelum dipimpin Nasir Abas. Terkait perampokan CIMB di Medan dan pelatihan militer di Aceh Besar, polisi mendeteksi Abu Tholut berkoordinasi melalui telepon dengan Toni Togar, mantan santri dan pengajar di Ponpes Ngruki, Sukoharjo, Solo, Jateng, yang kini adalah napi di LP Siantar Medan dengan masa hukuman 20 tahun penjara atas keterlibatannya di pengeboman JW Marriott, 2003. Menurut keterangan Sidney Jones dari *International Crisis Group* (ICG), dari peristiwa kamp pelatihan militer di Aceh saja terungkap ada 20 orang residivis dalam berbagai kasus kriminal. Kemudian, terdapat 17 orang yang pernah ditangkap polisi terkait terorisme.<sup>xxxiii</sup> Beberapa dari 17 orang itu merupakan nama-nama yang telah disebutkan di atas. Sementara itu, pihak kepolisian sendiri mengklaim dari ratusan orang yang pernah ditangkap hanya 20 orang yang bersedia bekerja sama aktif dengan kepolisian, salah satu diantaranya adalah Abdullah Sunata yang telah disebut di atas.<sup>xxxiv</sup>

Yang tidak kalah mengejutkan adalah longgarnya sistem penjara beserta kesempatan yang terbuka lebar bagi narapidana terorisme untuk menjalankan aksinya karena lengahnya pengawasan. Sebagai contoh adalah dugaan kuat keterlibatan Iwan Dharmawan alias Rois. Rois dari Ring Banten merupakan terpidana mati kasus pengeboman Kedubes Australia di Jakarta tahun 2004. Setelah mendeteksi adanya komunikasi telepon antara jejaring teroris dengan Rois yang berada di dalam LP Cipinang, polisi menggeledah penjara tersebut dan menemukan delapan telepon seluler yang dimiliki Rois.<sup>xxxv</sup> Fakta hukum dalam persidangan

di Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga menguatkan keterlibatan Rois. Syailendra, salah satu tersangka dalam Bom 17 Juli 2009 bersaksi bahwa dia dihubungi oleh Rois untuk menjemput salah satu pelaku bom bunuh diri Nana Ichwan Maulana untuk dipertemukan dengan Deni Suramto, yang juga residivis Bom JW Marriott 2003.

Berikut ini merupakan cerminan keadaan para narapidana terorisme di balik jeruji. Data ini didapatkan dari laporan YPP yang selama ini aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupaya menarik kembali para mantan jihadis ke dalam masyarakat dengan berbagai kegiatan wirausaha dengan visi untuk memperbaiki kualitas dan taraf hidup para mantan pelaku atau anggota jaringan radikal serta mengembangkan inisiatif dalam bidang *disengagement* yang berdasar pada masalah pokok di lapangan.<sup>xxxvi</sup> Menurut penuturan Nur Huda, deradikalisasi bukanlah tujuan utama melainkan deradikalisasi merupakan hasil yang diharapkan datang dari proses *disengagement*.

**Tabel 1 Penjara di Indonesia dan Program Deradikalisasi**

No	Penjara dan Status	Narapidana Teroris	Program Deradikalisasi	Catatan
1	Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta	10 orang. Figur Radikal : - Abu Husna <sup>xxxvii</sup> - Fajar Taslim	Tidak ada program khusus dalam menangani narapidana teroris. Tidak ada pembatasan interaksi dan kunjungan.	Pada 2009 Rois alias Iwan Darmawan terlibat lagi dalam kasus pelatihan bersenjata di Aceh dengan cara merekrut anak buah melalui komunikasi telepon genggam. Rois juga pernah memiliki “pesantren” di dalam penjara yang dijalankan oleh narapidana teroris.
2	Ruang tahanan narkoba Polisi Metropolitan Jakarta	10 orang. Figur Radikal: <sup>xxxviii</sup> - Abu Dujana Figur moderat: <sup>xxxix</sup> - Ali Imron Mubarok	Tidak ada program khusus dalam menangani narapidana teroris. Detasemen 88 memberikan cukup banyak perhatian secara personal dan mengontrol narapidana secara reguler. Metode yang digunakan adalah pendekatan personal.	Narapidana mudah melibatkan dirinya dalam diskusi kelompok. Di satu sisi lain, mereka juga bersedia bekerja sama dengan kepolisian untuk membongkar kasus terorisme.
3	Lapas Kelas I Tangerang, Banten	2 orang. Figur moderat: - Abdul Rouf alias Sam <sup>xl</sup>	Tidak ada program khusus dalam menangani narapidana teroris. Menerima program CMT ( <i>conflict management training</i> ) <sup>xli</sup> dari Ditjenpas dan LSM	Abdul Rouf dan Andri alias Yudi akan segera dibebaskan. Ada komunikasi antara petugas dengan narapidana teroris dan ada rasa patuh narapidana teroris terhadap peraturan Lapas.
4	Lapas Klas I Kedung Pane	5 orang. Figur Moderat : Sarjiyo aka	Ditempatkan dalam blok khusus tapi tanpa	Interaksi dengan narapidana lain dibatasi

	Semarang, Central Java	Sawad Suranto Abdul Ghoni	perlakukan khusus. Hanya bisa keluar blok saat kunjungan dan sholat Jumat di masjid penjara seminggu sekali. Menerima program CMT (conflict management training) dari Ditjenpas dan NGO's	namun ada keleluasaan kunjungan keluarga dan teman. Bahan bacaan diseleksi petugas. Ada komunikasi antara petugas dengan narapidana teroris, dan narapidana teroris secara relatif patuh pada peraturan.
--	---------------------------	------------------------------	---	--

**Lanjutan tabel 1.**

No	Penjara dan Status	Narapidana Teroris	Program Deradikalisasi	Catatan
5	Lapas Kelas IIA Nusakambangan, Jawa Tengah	Lebih dari 20 orang. Figur Radikal: - Rois alias Iwan Dharmawan - Subur Sugiarto	Lapas Batu sering mengundang ulama MUI ( <i>Indonesia Clerics Assembly</i> ) untuk berceramah dan berdiskusi dengan narapidana teroris. Menerima program CMT ( <i>conflict management training</i> ) dari Ditjenpas dan LSM	Ada pembatasan interaksi dan kunjungan keluarga dan teman. Ada perlawanan terhadap petugas karena kurangnya komunikasi dengan narapidana teroris. Bisa keluar blok hanya saat dikunjungi dan sholat Jumat seminggu sekali.
6	Lapas Kelas I Porong, Surabaya, Jawa Timur	18 orang. Figur Radikal : - Harun alias Nazarudin - Mohtar alias Abugar <sup>xlii</sup> - Maulana Yusuf Wibisono alias Kholis FigurModerat: - Syamsudin alias Fatur - Asep Jaja alias Dahlan	Ditempatkan dalam blok khusus. Menerima program CMT ( <i>conflict management training</i> ) dari Ditjenpas dan LSM. Pendekatan individual yang dilakukan oleh Kepala Lapas dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja di dalam penjara.	Ada komunikasi yang baik antara petugas dan narapidana teroris. Banyak narapidana teroris yang patuh pada peraturan Lapas.
7	Lapas Kelas IIA Lowokwaru, Malang, Jawa Timur	4 orang. Figur Radikal: - Agung Abdul Hamid	Tidak ada program khusus dalam menangani narapidana teroris.	Ada pembatasan interaksi tapi ada keleluasaan kunjungan keluarga dan teman.
8	Lapas di Sumatra Utara meliputi Lapas di Medan, Binjai, Lubuk Pakam dan Pematang Siantar.	7 orang. Figur Radikal: - Toni Togar alias Indrawarman	Tidak ada program khusus dalam menangani narapidana teroris.	Tidak ada pembatasan interaksi dan kunjungan keluarga dan teman. Toni Togar terbukti terlibat dalam perekrutan dalam peristiwa perampokan di bank CIMB Niaga Medan dengan komunikasi melalui telepon genggam.

9	Lapas Kelas I Pakjo, Palembang, Sumatra Selatan <sup>xliii</sup>	6 orang. Figur Radikal: - Abdurrahman Thaib	Tidak ada program khusus dalam menangani teroris. Penempatan narapidana teroris dicampur dengan narapidana criminal umum. Lapas Pakjo pada 2010 menerima CMT namun narapidana teroris tidak ikut sebagai peserta.	Tidak ada pembatasan interaksi dan kunjungan keluarga dan teman. Namun ada komunikasi yang baik antara petugas dan narapidana teroris sehingga ada kepatuhan terhadap peraturan Lapas.
---	--	---	---	--

**Lanjutan tabel 1**

No	Penjara dan Status	Narapidana Teroris	Program Deradikalisasi	Catatan
10	Lapas Kelas IIA Palu, Central Sulawesi dan beberapa Lapas lain di Sulawesi Tengah (Luwuk dan Ampaña)	31 orang. Figur Radikal: - Hasanudin	Tidak ada program khusus dalam menangani teroris. Menerima program CMT ( <i>conflict management training</i> ) dari Ditjenpas dan LSM.	Tidak ada pembatasan interaksi dan kunjungan keluarga dan teman. Ada komunikasi yang bagus antara petugas dengan narapidana teroris sehingga ada kepatuhan terhadap peraturan di Lapas. Beberapa narapidana teroris masih keras namun merespon pendekatan personal dari petugas.
11	Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat	Lebih dari 30 orang. Figur Radikal: - Abu Tholut	Tidak ada program khusus untuk menangani narapidana teroris.	Ada pembatasan interaksi dan kunjungan keluarga dan teman.
12	Lapas Klas IIA Waiheru Ambon, Maluku	3 orang. Figur Radikal: - Azadullah alias Arsyad	Tidak ada program khusus dalam menangani narapidana teroris.	Tidak ada pembatasan interaksi dan kunjungan.
13	Lapas Gunungsari, Makasar, Sulawesi Selatan	3 orang	Tidak ada program khusus dalam menangani narapidana teroris.	Tidak ada pembatasan interaksi dan kunjungan.

Sumber: *Kehidupan di Balik Jeruji, Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*. Position paper no. 02: Prasasti Perdamaian, November 2011.

Dari contoh-contoh kasus yang telah dijabarkan, tercermin bahwa pengubahan ideologi dalam benak dan pikiran para teroris tidak merupakan strategi yang dirancang sepenuhnya oleh pemerintah. Program deradikalisasi yang diterapkan tidak mampu mereduksi ideologi para jihadis dan tampak pula rendahnya kuantitas dan kualitas

keterlibatan para teroris dalam forum dialog. Proses rehabilitasi melalui lembaga permasyarakatan juga gagal memutus keterikatan hubungan para narapidana terorisme dengan jejaringnya dengan bermunculannya figur-figur mantan narapidana terorisme yang terlibat kembali dalam jejaring kelompok teror.

### **Faktor Struktural dalam Usaha Menangani Terorisme**

Deradikalisasi, termasuk tahapan *disengagement* ataupun rehabilitasi, pada dasarnya erat kaitannya dengan kuat-lemahnya faktor struktural negara. Argumen mengenai hal ini dapat ditinjau dalam pembahasan dibawah. Menurut Andi Widjajanto, gelombang kekerasan di Indonesia terjadi karena Indonesia memiliki struktur negara yang lemah.<sup>xliv</sup> Dalam sebuah negara lemah, kebijakan politik yang diambil terkondisikan oleh instabilitas politik, krisis legitimasi, lemahnya identitas nasional, tidak berfungsinya institusi sosial politik, kemiskinan ekonomi dan sangat rentan terhadap tekanan tekanan eksternal.<sup>xlv</sup> Hal ini membuat elit politik terus menerus berada dalam proses *crisis management* atau yang lebih dikenal dengan *politics of survival*.<sup>xlvi</sup> Kajian tentang adanya kaitan antara gelombang kekerasan di Indonesia pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang adanya kemungkinan bagi Indonesia untuk mengalami kondisi yang jauh lebih buruk dan menjadi *failed state* atau negara gagal. Namun, Widjajanto berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadi negara gagal karena berbagai alasan, diantaranya:

- a. Selain Timor Timur, Aceh dan Papua, tidak ada aksi separatis yang berupaya untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia.
- b. Adanya dukungan luas dari komunitas internasional bagi integritas teritorial Indonesia.
- c. Aksi-aksi komunal cenderung bersifat sporadik dan ditandai dengan adanya provokasi pihak ketiga yang memicu konflik.
- d. Meningkatnya resistensi dan rasa antipasti masyarakat Indonesia terhadap aksi aksi kekerasan.
- e. Munculnya berbagai organisasi non-pemerintah yang berupaya untuk menciptakan *civil society* di Indonesia.

Selain kelima alasan tersebut, Widjajanto juga mengungkapkan bahwa untuk mencegah Indonesia menjadi negara gagal atau *failed state* dapat dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah:

- a. Proses demokratisasi melalui partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
- b. Revitalisasi institusi politik yang demokratis.
- c. Alokasi sumber daya material dan finansial yang adil antara pemerintah pusat dengan daerah.
- d. Mengatasi *deprivation of human needs* termasuk kebutuhan akan materi dan identitas etnik ataupun agama.

William Wise mengemukakan bahwa selama berkejadiannya masalah politik dan ekonomi di akhir tahun 1990an, beberapa analisis mendeskripsikan Indonesia sebagai negara gagal. Namun peristiwa-peristiwa berikutnya menanggukkan penilaian ini meskipun politiknya tidak stabil, hubungan antara rakyat sipil dan militer yang buruk, kekerasan komunal, dan organisasi teroris lokal, Indonesia sepertinya masih tetap lemah secara kronis dengan sedikit kemungkinan masuk dalam kategori negara gagal.<sup>xlvi</sup> Dalam ini, ketidakmampuan Indonesia untuk mengendalikan masalah bisa menimbulkan akibat yang akan dirasakan oleh negara tetangga, terutama Filipina dan Malaysia. Dengan ukuran dan perannya di Asia Tenggara, lemahnya Indonesia merepresentasikan ancaman laten terhadap stabilitas regional dan kelompok teroris lokalnya, dengan keterkaitan al-Qaeda, menimbulkan ancaman yang tinggi baik untuk negara maupun regional Asia Tenggara.<sup>xlvi</sup> Hal ini didukung oleh pernyataan Michael Malley yang juga mengategorikan Indonesia sebagai negara yang “sangat lemah.”

Buzan mengembangkan sebuah anatomi (lihat tabel di bawah) yang kemudian digunakan oleh Holsti untuk mengembangkan konsep legitimasi yang berkenaan dengan hak negara untuk memerintah bangsa melalui penyediaan jasa-jasa seperti keamanan, keadilan, perangkat hukum, kekuatan bernegara, dan variasi-variasi kesejahteraan.<sup>xlix</sup> Proses awal pembentukan negara-bangsa akan dipenuhi dengan usaha negara untuk memperoleh legitimasi horizontal dan vertikal. Legitimasi horizontal berkaitan dengan kemampuan negara untuk menciptakan dan menjaga kohesi sosial antara komponen bangsa, sementara legitimasi vertikal berurusan dengan kemampuan negara untuk menerapkan perangkat-perangkat administratif formalnya kepada seluruh komponen bangsa. Kegagalan negara

untuk mendapatkan legitimasi vertikal dan horizontal akan memicu terjadinya tanggapan masyarakat mulai dari sekedar penolakan verbal terhadap peran negara (*endurance*) hingga pemberontakan bersenjata.<sup>1</sup>

**Tabel 2 Tipologi Negara**

State : Idea + Institutional expression + Physical Base			Physical Base os state		
			Strong	Weak	
Idea of state	Strong	Institutional Expression of state	Strong	Tipe 1	Tipe 2
			Weak	Tipe 3	Tipe 4
	Weak		Strong	Tipe 5	Tipe 6
			Weak	Tipe 7	Tipe 8

Sumber: Diuraikan oleh Andi Widjajanto, *Perang Internal dan Proses Pembentukan Bangsa–Bangsa: Draft Modul Pengajaran Metodologi Penelitian Terorisme*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Ayoob mempertajam kajian ini dengan menempatkan proses awal pembentukan negara-bangsa di dunia ketiga yang berasal dari proses dekolonialisasi sebagai sumber ketidakamanan (*insecurity*) negara-negara dunia ketiga. Hal ini karena proses dekolonialisasi meninggalkan kerapuhan batas teritorial negara, ketidaksiapan institusi politik, lenyapnya struktur adat, kegagalan rekayasa sosial, hingga rendahnya kohesi sosial antar komponen bangsa.<sup>li</sup> Ketidakamanan ini cenderung ditangani negara dengan pola-pola represif dalam rentang waktu yang panjang untuk memperkuat rezim politik, yang dilihat oleh Ayoob sebagai strategi yang cenderung dibutuhkan dalam proses awal pembentukan negara-bangsa. Dan hal ini akan menimbulkan *security dilemma*, dalam arti upaya maksimal negara untuk memproyeksikan kemampuan penggunaan kekerasan akan menurunkan legitimasi negara tersebut di mata bangsa.<sup>lii</sup>

Lalu, dimanakah letak keterkaitan Indonesia sebagai negara lemah dengan terorisme yang terjadi didalamnya? Berangkat dari tipologi negara yang dikemukakan oleh Buzan,<sup>liii</sup> Indonesia tidak masuk ke dalam kategori paling ekstrim, yaitu: kategori kedelapan, dimana negara yang masuk dalam kategori ini merupakan negara gagal dan memiliki institusi dan dasar fisik yang lemah. Namun, berdasarkan kajian anatomi negara tersebut, yang melihat upaya negara untuk meningkatkan legitimasi yang berkenaan dengan hak negara untuk memerintah bangsa dan memperoleh legitimasi baik horizontal maupun vertikal, Indonesia masih belum mampu mendapatkan kedua legitimasi tersebut. Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan serta ketidakmampuan pemerintah dalam mendapatkan legitimasi di mata rakyatnya terkait erat dengan penggunaan militer

secara pervasif di masa Soeharto seperti yang ditekankan oleh Ayoob bahwa pola penanganan yang represif dalam jangka waktu yang lama akan menurunkan legitimasi negara dimata bangsa.<sup>liv</sup>

Ketidakpercayaan bangsa terhadap negara mempermudah jaringan terorisme untuk berkembang subur di dalam masyarakat yang lebih mempercayai seorang pendatang baru yang kemungkinan adalah seorang anggota jaringan teroris daripada perkataan dan propaganda aparat untuk waspada terhadap pada pendatang baru. Ini merupakan sebuah contoh kecil yang menggambarkan bahwa negara Indonesia belum mampu memenangkan legitimasi vertikal, dimana sebuah negara sudah mampu menerapkan perangkat-perangkat administratif formalnya kepada seluruh komponen bangsa. Hal ini mengarah pada penolakan masyarakat terhadap peran negara dalam memerangi terorisme sehingga jaringan dan gerakan terorisme semakin menjalar kepenjuru masyarakat. Selain itu, gagalnya pemerintahan Indonesia dalam menerapkan perangkat-perangkat administratifnya tercermin dari kacaunya serta kelengahan yang terjadi dalam manajemen penjara seperti yang terurai dalam kasus terorisme di atas dimana narapidana bisa mengendalikan jaringan terorisme dari dalam penjara.

Ancaman ini menjadi kian nyata mengingat gelombang terorisme yang terjadi memasuki tahap dimana target sasaran para anggota kelompok teror kembali kepada target “dekat,” yaitu: pemerintahan yang *thaghut* (setan) yang dianggap memihak Barat dan tidak memihak rakyat Indonesia. Bisa jadi ini hanyalah hal kecil yang dijadikan celah oleh para anggota teroris untuk melancarkan serangannya. Namun, jika hal tersebut terbukti benar (pemerintah tidak memihak rakyat dan tidak memberikan hak rakyat) maka Indonesia secara langsung memiliki pemicu terorisme yang kian hari kian menunjukkan fraksi-fraksi kecil dalam pola serangan dan jaringannya. Hal ini didukung oleh Sidney Jones yang mengungkapkan dalam salah satu kuliahnya bahwa terorisme Indonesia sekarang ini diawali dari peristiwa-peristiwa anarkis kecil, yaitu: perusakan tempat tempat belanja yang menjual minuman keras atau protes terhadap masjid yang memakai atribut tidak sesuai menurut para penganut paham radikal dan hal itu dibiarkan tanpa menyadari bahwa hal tersebut akan kontribusi pada penanganan terorisme di Indonesia akan nampak.<sup>lv</sup> Oleh karenanya, pembenahan struktural seperti pembenahan sistem penjara akan memiliki dampak yang begitu besar terhadap keberhasilan program antiterorisme yang dicanangkan pemerintah

sehingga kesuksesan yang didapat bukan hanya berada di permukaan, namun menyeluruh meliputi semua elemen yang tidak tampak di permukaan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berpendapat bahwa apa yang disebut sebagai program deradikalisasi sebenarnya hanya merupakan bagian dari strategi atau metode penggalian informasi dalam rangka membongkar jejaring terorisme, sebuah pendekatan intelijen yang sebenarnya sudah digunakan. Di sisi lain, kesuksesan dari program ini masih harus dipertanyakan. Hal ini terungkap dari fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas yang menunjukkan bahwa hanya sedikit contoh sukses yang signifikan dari program deradikalisasi, yaitu: kasus Nasir Abas dan Ali Imron. Sukses disini didefinisikan sebagai kondisi dimana para pelaku tersebut sudah tidak terlibat kembali dalam aktifitas terorisme setelah mereka sudah lepas dari penjara dan ikut serta dalam proses mempromosikan paham yang mendelegitimasi kekerasan termasuk mempromosikan program deradikalisasi itu sendiri. Kedua mantan pelaku ini juga sangat berperan dalam memberikan informasi mengenai perencanaan tindakan terorisme. Sementara itu, selain kedua pelaku ini, sisa mantan narapidana yang sejauh ini tidak terlibat kembali dalam aktivitas terorisme tidak menunjukkan apakah mereka terderadikalisasi hingga di level kognitif. Tidak ada pengujian level radikalisme terhadap para mantan narapidana yang tersebut. Disamping sulitnya mengukur level kognitif radikalisasi para mantan tersangka kasus terorisme, kegagalan program deradikalisasi yang diklaim pemerintah juga didukung oleh fakta ditemukannya para anggota lama yang terlibat kembali ke dalam jaringan aktif terorisme pasca meninggalkan penjara. Sebagai contoh, dalam kasus kamp pelatihan militer di Aceh ditemukan keterlibatan para residivis seperti Enceng Kurnia alias Arham, Deni Suramto alias Ziad alias Toriq, Lutfi Haedaroh alias Ubeid, Abdullah Sunata, dan Abu Tholut. Kasus Abdullah Sunata merupakan contoh nyata dimana tersangka kasus terorisme bisa dengan mudah mendapatkan keringanan hukuman, yang didapatkan sebagai imbalan atas partisipasinya dalam program deradikalisasi, dan kemudian aktif kembali dalam kegiatan jaringan terorisme.

Sementara itu, para bekas narapidana terorisme yang bersedia ikut dalam program deradikalisasi umumnya dapat dikatakan hanya simpatisan kelompok terorisme atau

“pelaku” dalam eksekusi rencana serangan terorisme dan bukan anggota yang berperan penting dalam perencanaan atau mereka yang menyebarkan ideologi berbasis kekerasan. Potensi munculnya sikap apriori dari pihak yang menjadi obyek program deradikalisasi pun terbuka lebar. Dari sederet kasus keterlibatan narapidana dan mantan narapidana terorisme disini, tulisan ini berpendapat bahwa program deradikalisasi di Indonesia sejauh ini kurang realistis dan tak dapat diandalkan sebagai strategi dalam “memulihkan” ideologi garis keras para militan yang terlibat dalam jejaring terorisme.

Tulisan ini juga beranggapan bahwa sebuah negara demokrasi harus bisa menerima keragaman ideologi. Ideologi tidak perlu dipandang sebagai penyakit yang harus diobati. Namun, negara harus senantiasa konsisten dan tegas menindak setiap aksi kekerasan tanpa memandang latar belakang ideologinya. Kekerasan yang dimaksud sepatutnya juga mencakup kekerasan verbal berupa *syiar* kebencian (*hate speech*) terhadap kelompok lain karena potensi dampak yang ditimbulkan. Potensi nyata aksi kekerasan, misalnya pelatihan militer ilegal, perlu ditindak tegas oleh aparat negara. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa struktur perangkat negara masih lemah dan korup menjadikan program deradikalisasi cenderung ilusif dan tidak realistis. Hal ini juga berkontribusi pada ketidakmampuan pemerintahan untuk melaksanakan program *disengagement* dalam dimensi fisik dan struktural, yaitu: melalui rehabilitasi di penjara, akibat institusi hukum, termasuk lembaga permasyarakatan, yang lemah, korup, dan buruk infrastrukturnya. Indonesia perlu untuk terlebih dahulu membenahi kekacauan struktural dalam sistem dan institusi hukum sehingga proses *disengagement* terhadap para pelaku teror terlaksana secara lebih baik dan akuntabel. Setelah tahap *disengagement* ini berhasil, Indonesia baru bisa melangkah lebih lanjut pada program yang menysar ideologi, yaitu: deradikalisasi.

Tulisan ini juga meyakini bahwa proses deradikalisasi membutuhkan kondisi negara yang layak, yaitu kondisi yang memberi rasa aman (*security*) dan kesejahteraan (*welfare*) bagi rakyatnya dalam berbagai sendi kehidupan. Dalam kondisi kehidupan bernegara yang demikian, paham radikal keagamaan, seperti keyakinan akan perlu tegaknya negara Islam, berpotensi kehilangan legitimasinya. Saat paham radikal ini kehilangan legitimasinya di mata publik, paham tersebut menjadi sulit “dijual” dan sulit berkembang dengan sendirinya.

Tulisan ini juga ingin mengungkapkan bahwa strategi kontra-radikalisasi bisa lebih memungkinkan untuk diterapkan dibandingkan dengan deradikalisasi, namun tetap

diimbangi dengan pelaksanaan tinjauan menyeluruh mengenai alternatif lain untuk penanganan para tersangka dan terpidana kasus terorisme dan untuk mencegah mereka masuk kembali ke lingkaran paham radikal. Salah satu alternatif yang berpotensi adalah pemberdayaan lembaga non-pemerintah, baik dengan cara bekerja dengan mereka atau melakukan optimalisasi program yang sudah mereka jalankan selama ini. Hal ini akan memantapkan posisi pemerintah Indonesia di mata rakyat dengan cara mempertahankan legitimasinya di mata publik. Dengan begitu, negara memiliki posisi tawar yang tinggi untuk memperluas dan memperkuat diskursus pro-demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.

Merujuk pada kutipan Noam Chomsky di awal tulisan ini, tulisan ini berkesimpulan bahwa menghentikan terorisme tidak perlu dengan berusaha terlalu keras menderadikalisasi teroris atau kaum militan tanpa mempertimbangkan alternatif lain dan merumuskan pendekatan serta penanganan terorisme yang lebih kohesif. Ketika kinerja pemerintah dalam bernegara membaik, dengan sendirinya negara berhenti “berpartisipasi” dalam terorisme itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, ketika kinerja pemerintah/negara buruk, negara dapat dianggap berpartisipasi dalam terorisme.

## Daftar Pustaka

Buku, Artikel, dan Publikasi Lain

- Abuza, Zachary (2010). “Indonesia Counter-Terrorism: The Great Leap Forward.” *Terrorism Monitor*, Vol. 8.
- Abuza, Zachary (2003). *Militant Islam in Southeast Asia, Crucible of Terror*. Colorado: Lynne Rienner Publisher.
- Ayoob, Mohammed (1995). *The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System*. London: Lynne Rienner.
- Ayoob, Mohammed (1996). “State Making, State Breaking, and State Failure.” Chester A Crocker, , et. al., eds. *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to Interational Conflict*. Washington DC.: USIP.
- Buzan, Barry (1991). *People, States and Fear: And Agenda for International Security studies in The Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Clausewitz, Carl von (1989). *On War*. Princeton: Princeton University Press.
- Fanie, Zainudin, Sabardila, Atiqa, dan Purnanto, Dwi (2001). *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Surakarta: The Asia Foundation.
- Fealy, Greg dan Bubalo, Anthony (2007). *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Fink, Naureen Chowdury dan Hearne, Elly B (2008). *Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism*. New York: International Peace Institute.

- Golose, Petrus Reinhard (2009). *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Gray, Collin S. (2007). *War, Peace, and International Relation: An Introduction to Strategic History*. New York: Routledge.
- Horgan, John (2008). "Individual Disengagement: A Psychological Analysis." Tore Bjorgo dan John Horgan, eds. *Leaving Terrorism Behind: Individual and and Collective Disengagement*. New York: Routledge.
- Horgan, John (2008). "Deradicalization or Disengagement?" *Perspective on Terrorism*, Vol. 2, No. 4.
- ICG (2007). "Deradikalisasi dan Lembaga Per masyarakatan di Indonesia." *Crisis Group Asia Report*, No. 142.
- ICG (2005). "Daur Ulang Militan di Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia." *Crisis Group Asia Report*, No. 92.
- Jackson, Richard (2001). "The State and Internal Conflict" dalam *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 55, No. 1.
- Karnavian, Muhammad Tito (2010). *The Soft Approach Strategy in Coping with Terrorism in Indonesia*. Makalah tidak dipublikasikan yang dibawakan dalam kuliah umum di UI, Februari 2010.
- Mamoto, Benny Jozua (2008). *Penanganan Polri Terhadap Organ Teror dalam Al Jamaah Al Islamiyah*. Disertasi tidak dipublikasikan dalam Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, 2008.
- Malley, Michael (2003). "Indonesia: The Erosion of State Capacity." Robert I. Rotberg, ed. *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. Princeton: Princeton University Press.
- Pedoman Umum Perjuangan Al Jamaah Al Islamiyah (PUPJI)*. Dikeluarkan oleh Majelis Qiyadah Markaziyah Al Jamaah Al Islamiyah, 30 Mei 1996.
- Rabasa, Angel, et.al. (2010). *Deradicalizing Islamist Extremist*, Santa Monica: RAND.
- Solahudin. (2011). *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Takeyh, Ray dan Gvodsex, Nikolas. "Do Terrorist Networks Need a Home?" Alexander T. J. Lennon, ed. *The Battle for Hearts and Minds: Using Soft Power to Undermine Terrorist Networks*. Cambridge: The MIT Press.
- Widjajanto, Andi (2010). "Gelombang Kekerasan Di Indonesia." *Draft Modul Pengajaran Metodologi Penelitian Terorisme*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wise, William M. (2004). *American Perspectives on the Threat Posed by Weak and Failing Asian States*. Beijing: China Institutes of Contemporary International Relations.

#### Media Massa

- BBC News, "Bali bomber spotted at Starbucks", 2 September 2004.
- Febriane, Sarie, "Sampean Dapat Salam dari Jafar Mistoki", *Harian Kompas*, Senin 6 Juli 2009.
- Harian Kompas*, "Perlu Pendekatan Baru: Identitas Mr.X Akan Diumumkan Polri Hari Ini", Rabu 12 Agustus 2009.
- Harian Kompas*, "Noordin Tewas di Kamar Mandi: Malaysia Akui Tak Berperan Dalam Operasi", Jumat 18 September 2009.
- Harian Kompas*, "Teror Diatur dari Penjara", Kamis 18 Maret 2010.

Harian Kompas, “Pembebasan Sunata Dianggap Ganjil”, Senin 17 Mei 2010.  
Indopos, “10 Ponsel Pelaku Bom Bali II Disita”, 9 Februari 2007.  
Majalah Tempo (edisi bahasa Inggris), 19 November 2007.  
Time, “What Indonesia Can Teach the World About Counterterrorism”, June 7, 2010.

Tautan dari Sumber di Internet

<http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesias-deradicalization-program-under-fire/382546>.  
<http://www.investor.co.id/home/penegakan-hukum-lemah-bnpt-indonesia-surga-bagi-teroris/9000>.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2011/10/111013\\_vonistholut.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/10/111013_vonistholut.shtml).  
<http://www.detiknews.com/read/2006/09/01/163351/667193/10/sipir-beni-pemasok-laptop-imam-samudra-resmi-tersangka?nd992203605>.  
<http://muslimdaily.net/berita/lokal/1143-dialog-dengan-abu-rusdan-bedakan-jihad-dengan-terorisme.html>.  
<http://www.prasastiperdamaian.com>.

## Catatan Belakang

---

<sup>i</sup> Sartono Kartodirjo, “Ratu Adil”, Jakarta: Sinar Harapan, 1985 dikutip dalam Zainudin Fananie, Atiqa Sabardila, dan Dwi Purnanto, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, Surakarta: The Asia Foundation, 2001.

<sup>ii</sup> *Ibid*

<sup>iii</sup> *Ibid*.

<sup>iv</sup> <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/32/html>.

<sup>v</sup> Solahudin, “NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia”, Depok:2011.

<sup>vi</sup> *Ibid*, hal. 7-10.

<sup>vii</sup> Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2007.

<sup>viii</sup> *Ibid*. Greg mencatat soal kemiripan gagasan tulisan tersebut sebagai versi Islamis dari *What is to be Done* karya Lenin, namun hal ini menurutnya perlu diteliti lebih jauh.

<sup>ix</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/05/15592674/Survei.Indonesia.Masih.Rentan.Aksi.Radikalisme?1449630240>.

<sup>x</sup> <http://mdev.detik.com/read/2011/04/28/143620/1627745/159/sulit-dipercaya-49--pelajar-setuju-aksi-radikal>.

<sup>xi</sup> Time, “What Indonesia Can Teach the World About Counterterrorism”, June 7, 2010.

<sup>xii</sup> Zachary Abuza, “Indonesia Counter-Terrorism: The Great Leap Forward” dalam *Terrorism Monitor*, Vol. 8, 14 Januari 2010.

<sup>xiii</sup> Febriane, Sarie, “Sampean Dapat Salam dari Jafar Mistoki”, *Harian Kompas*, Senin 6 Juli 2009.

<sup>xiv</sup> *Ibid*.

<sup>xv</sup> Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian: Jakarta, 2009. Dalam buku ini Golose juga mengatakan bahwa polisi yang bersinggungan langsung dengan teroris harus mengerti kultur mereka, misalnya: mengucapkan salam saat berjabat tangan dan sholat berjamaah saat waktunya tiba. Polisi penyidik juga harus sabar, halus dalam berbahasa, komunikatif dan persuasif.

<sup>xvi</sup> Berdasarkan pengamatan penulis (Sarie Febriane) secara langsung saat meliput peristiwa penangkapan Abu Dujana, 2007.

<sup>xvii</sup> “Bali Bomber Spotted at Starbucks,” *BBC News* 24, 2 September 2004.

<sup>xviii</sup> ICG, “Daur Ulang Militan di Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia,” *Crisis Group Asia Report* No. 92, 22 Februari 2005.

<sup>xix</sup> *Ibid*.

- 
- <sup>xx</sup> John Horgan, "Individual Disengagement: A Psychological Analysis", dalam Tore Bjorgo dan John Horgan, eds., *Leaving Terrorism Behind: Individual and and Collective Disengagement*, New York: Routledge, 2008.
- <sup>xxi</sup> *Ibid.* Hal ini diungkapkan oleh John Horgan berdasarkan atas wawancara yang dilakukan terhadap puluhan para mantan pelaku tindakan terorisme.
- <sup>xxii</sup> Informasi ini berdasarkan keterangan langsung kepada penulis (Sarie Febriane) dari polisi yang terlibat dalam operasi penyeragaman Dulmatin di Pamulang.
- <sup>xxiii</sup> Angel Rabasa, "Deradicalizing Islamist Extremist". Santa Monica: RAND, 2010.
- <sup>xxiv</sup> John Horgan, "Deradicalization or Disengagement?" dalam *Perspective on Terrorism*, Vol. 2, No. 4, 2008.
- <sup>xxv</sup> <http://www.investor.co.id/home/penegakan-hukum-lemah-bnpt-indonesia-surga-bagi-teroris/9000>.
- <sup>xxvi</sup> <http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesias-deradicalization-program-under-fire/382546>.
- <sup>xxvii</sup> *Harian Kompas*, "Perlu Pendekatan Baru: Identitas Mr.X Akan Diumumkan Polri Hari Ini", Rabu 12 Agustus 2009.
- <sup>xxviii</sup> Noor Huda Ismail merupakan lulusan Pondok Pesantren Ngruki pimpinan Abu Bakar Ba'asyir di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Dari bukunya berjudul "Temanku Teroris?" terungkap bahwa terpidana Bom Bali I, Mubarak, merupakan teman satu kamar dengan Huda selama di pesantren. Sebagai alumnus Ngruki, Huda memiliki hubungan baik dengan jejaring kelompok radikal.
- <sup>xxix</sup> *Harian Kompas*, "Noordin Tewas di Kamar Mandi: Malaysia Akui Tak Berperan Dalam Operasi", Jumat 18 September 2009.
- <sup>xxx</sup> *Ibid.*
- <sup>xxxi</sup> *Harian Kompas*, "Pembebasan Sunata Dianggap Ganjil", Senin 17 Mei 2010.
- <sup>xxxii</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2011/10/111013\\_vonistholut.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/10/111013_vonistholut.shtml).
- <sup>xxxiii</sup> Rabasa, *Op.Cit.*
- <sup>xxxiv</sup> *Ibid.*
- <sup>xxxv</sup> *Harian Kompas*, "Teror Diatur dari Penjara", Kamis 18 Maret 2010.
- <sup>xxxvi</sup> <http://www.prasastiperdamaian.com>.
- <sup>xxxvii</sup> Pada saat tulisan ini dibuat (November 2011) Abu Husna dan Fajar Taslim masih menjalani hukuman di Lapas Cipinang sampai Agustus 2011. Sekarang mereka sudah dipindahkan ke Lapas Batu, Nusakambangan.
- <sup>xxxviii</sup> Terminologi figur radikal disini berarti secara ideologis figur tersebut masih radikal dan punya kecenderungan untuk tetap berada radikalisme ide (maupun tindakan) serta punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.
- <sup>xxxix</sup> Terminologi figur moderat disini berarti secara ideologis figur tersebut sudah mulai memiliki pandangan moderat dan lebih terbuka menghadapi pandangan-pandangan lain diluar prinsip-prinsip radikalisme.
- <sup>xl</sup> Saat ini Abdul Rauf sudah dibebaskan dan tinggal di Tangerang.
- <sup>xli</sup> Untuk lebih jelas mengenai CMT (*Conflict Management Training*) yang dilakukan oleh *Search For Common Ground* (SFCG) Indonesia, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta dan YPP (Yayasan Prasasti Perdamaian), bisa dilihat <http://www.sfcg.org/articles/SFCG%20CMT%20CLIPPINGS%20FINAL%208-10.pdf>.
- <sup>xlii</sup> Saat ini Harun alias Abugar sudah dibebaskan dan tinggal di Ambon.
- <sup>xliiii</sup> Saat ini narapidana teroris di Lapas Pakjo Palembang dipindahkan ke Lapas Merah Mata, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Lihat dalam <http://www.detiknews.com/comment/2011/03/03/204043/1584218/10/terpidana-teroris-palembang-dipindahkan-ke-lapas-merah-mata>.
- <sup>xliiv</sup> Andi Widjajanto, "Gelombang Kekerasan Di Indonesia," *Draft Modul Pengajaran Metodologi Penelitian Terorisme*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- <sup>xli v</sup> Richard Jackson, "The State and Internal Conflict," dalam *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 55, No. 1, 2001, hal. 65-82.
- <sup>xli vi</sup> Ray Takeyh and Nikolas Gvodsev, "Do Terrorist Networks Need a Home?" dalam Alexander T. J. Lennon, ed., *The Battle for Hearts and Minds: Using Soft Power to Undermine Terrorist Networks*, Cambridge: The MIT Press, 2003.
- <sup>xli vii</sup> William M. Wise, , *American Perspectives on the Threat Posed by Weak and Failing Asian States*, Beijing, 23-24 Februari 2004.
- <sup>xli viii</sup> Michael Malley, "Indonesia: The Erosion of State Capacity," dalam Robert I. Rotberg, ed., *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, hal. 183-218.
- <sup>xli x</sup> Holsti, *Op.Cit.*

---

<sup>1</sup> Barry Buzan, *People, States and Fear: And Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*, London: Harvester Wheatsheaf, 1991.

<sup>ii</sup> Mohammed Ayoob, *The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System*, London: Lynne Rienner, 1995, bab 2. Lihat juga Ayoob, “*State Making, State Breaking, and State Failure*”, dalam Chester A. Crocker, et.al., eds., *Managing Global Chaos: Sources of And Responses to International Conflict*, Washington DC.: USIP, 1996.

<sup>iii</sup> Ayoob (1995), *Op.Cit.*, hal. 28–32.

<sup>iiii</sup> Lihat tabel 2.

<sup>liv</sup> Ayoob (1995), *Op.Cit.*, hal. 28–32.

<sup>lv</sup> Sidney Jones, *Evolusi Jejaring Teror di Indonesia*, Jakarta, 27 September 2011.